

JURNAL ICMES
The Journal of Middle East Studies

DAFTAR ISI

	Pengantar	
Timur Tengah dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional		5
	<i>Dina Y. Sulaeman (Direktur ICMES)</i>	
Studi Timur Tengah dan Orientasi Politik Luar Negeri Republik Indonesia		11
	<i>R. Widya Setiabudi Sumadinata (Direktur Pusat Studi Timur Tengah Unpad)</i>	
Peran Media dalam Pembentukan Opini Publik Mengenai Isu Timur Tengah		17
	<i>M. Khoirul Malik</i> (Direktur Pusat Studi Timur Tengah IAIN Tulungagung)	
Timur Tengah dalam Hegemoni Amerika Serikat		21
	<i>Kiki Mikail</i> (Prodi Politik Islam UIN Raden Patah Palembang)	
	Artikel	
Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Arah Kebijakan Arab Saudi dalam Konflik Yaman Pasca Arab Spring 2011-2017		25
	<i>Firmanda Taufiq dan Lalu Wahyu Putra Utama</i>	
Peran American <i>Military Industrial Complex</i> dalam Konflik Bersenjata di Timur Tengah		45
	<i>Ajie Mahar Muhammad</i>	



Dukungan Irlandia Terhadap Upaya Perdamaian di Palestina	65
<i>Rostamaji Kornawan</i>	
Kebijakan Luar Negeri Obama Dalam Konflik Timur Tengah: Kasus Libya	83
<i>Laode Muhamad Fathun</i>	
Peran Liga Arab Pada Konflik di Timur Tengah dalam Perspektif Politik dan Ekonomi	99
<i>Alifian Maulana Nanda Pradana dan Dina Yulianti</i>	

PENGANTAR

Timur Tengah dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional

Timur Tengah selalu identik dengan konflik. Di saat yang sama, karena Timur Tengah menjadi tempat lahirnya tiga agama terbesar dunia, Islam, Kristiani, Yahudi, perspektif yang digunakan untuk menganalisis konflik Timur Tengah sering sekali berupa perspektif agama. Pemetaan faksi-faksi yang berkonflik yang dilakukan oleh media massa dan para pengamat sangat umum berupa pemetaan agama atau mazhab. *Labelling* terhadap kelompok anti-Abdrabu Mansur Al Hadi di Yaman, misalnya, adalah “kelompok Syiah Houthi” dengan mengabaikan bahwa gelombang pro-demokrasi dan pro-reformasi di Yaman terdiri dari berbagai faksi. Atau, tentara nasional Suriah (Syrian Arab Army) sering dipetakan sebagai tentara Syiah, tanpa menghiraukan data bahwa anggota SAA mayoritas Sunni, plus Alawi dan Kristiani. Di Palestina, perjuangan melawan Israel juga hampir selalu dipetakan sebagai perjuangan Muslim melawan Yahudi, ketika faktanya warga Palestina pun cukup banyak yang Kristiani dan Yahudi. Pelabelan atas dasar agama atau mazhab kemudian membangun opini bahwa konflik di Timur Tengah berakar pada agama dan perdebatan panjang mengenainya pada akhirnya membawa kita ke jalan buntu, dan bahkan kebencian.

Bila kita bersedia membuka ruang pandang yang lebih luas, sesungguhnya studi Hubungan Internasional, Ilmu Politik, atau bidang-bidang ilmu lainnya menyediakan banyak ragam perspektif yang bisa memperkaya wawasan



sehingga kajian yang dilakukan dapat lebih komprehensif. Secara alami, analisis terhadap sebuah fenomena yang kompleks akan lebih mendalam dan memuaskan bila melibatkan banyak disiplin ilmu (multidisipliner). ICMES yang didirikan sejak 2015 memiliki misi untuk menghadirkan kajian multidisipliner semacam ini dengan harapan bahwa publik di Indonesia, khususnya para peminat Kajian Timur Tengah, dapat bersama-sama memperluas horizon cara pandang mengenai Timur Tengah.

Salah satu perspektif yang menarik dan penting untuk digunakan dalam mengkaji Timur Tengah adalah Ekonomi Politik Internasional (EPI). Seperti dikemukakan oleh Michael Veseth, EPI merupakan kajian yang lahir akibat semakin meluruhnya batas-batas antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, dan ilmu sosial secara umum. Yang menarik, lahirnya EPI ternyata di antaranya dipicu oleh dinamika politik Timur Tengah pada tahun 1970-an yang menunjukkan betapa berjalannya berkelindannya kedua bidang ilmu ini.

Pada saat itu, bertepatan dengan Perang Arab-Israel tahun 1973, AS mengalami krisis ekonomi yang cukup parah akibat embargo minyak yang dilakukan negara-negara Arab anggota *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Mereka mengembargo AS karena negara itu memberikan bantuan militer kepada Israel. Selain AS, negara-negara Arab juga mengembargo negara-negara pro-Israel lainnya seperti Belanda, Portugis, dan Afrika Selatan. Bentuk embargo yang dilakukan adalah menghentikan ekspor minyak ke negara-negara target embargo dan mengurangi produksi minyak OPEC.

Menurut Veseth, fenomena tersebut menggambarkan lima dimensi kunci EPI, yaitu sebagai berikut.

1. Embargo minyak ini menunjukkan besarnya kekuatan dan pengaruh ekonomi terhadap kebijakan luar negeri. Kini, tidak ada negara yang berani membuat kebijakan politik tanpa mempertimbangkan reaksi ekonomi dari dunia luar.
2. Embargo minyak ini menunjukkan bahwa masalah politik-ekonomi sangat mempengaruhi hubungan antara negara-negara Utara-

Selatan dan bahwa politik yang sesungguhnya adalah 'ekonomi-politik'

3. Embargo minyak ini mengungkapkan ketergantungan yang kompleks antara politik dalam negeri, ekonomi dalam negeri, politik internasional, dan ekonomi internasional.
4. Embargo minyak ini mengangkat persoalan baru, apakah MNCs (*Multi National Corporation*) harus setia kepada negara asalnya, atau kepada negara di mana mereka beroperasi dan meraih keuntungan? Apakah MNC adalah alat dari pemerintah Barat, atau mereka bertindak sebagai agen dari negara tempat mereka beroperasi, atau murni menjadi aktor ekonomi independen?
5. Embargo minyak ini memicu globalisasi ekonomi, antara lain pembentukan sistem keuangan yang berjejaring secara global sehingga kini keuangan dan ekonomi berada di luar kontrol satu negara individu.¹

Ketika AS memutuskan untuk menggempur Irak pada tahun 2003, dengan alasan adanya informasi intelijen bahwa Presiden Irak, Saddam Hussein, menyimpan senjata pembunuh massal, negeri Paman Sam itu harus menggelontorkan dana yang sangat besar. Meskipun pada 2011 otoritas AS akhirnya mengakui bahwa tidak ada senjata pembunuh massal di Irak, perang terus berlangsung. Hingga tahun 2013, tepat 10 tahun masa perang, AS telah mengeluarkan dana 800 Miliar US Dollar, dan ini belum termasuk biaya yang harus dibayarkan terus-menerus kepada para veteran perang. Namun di saat yang sama, ada sangat banyak perusahaan AS yang meraih uang besar berkat Perang Irak. Perang Irak rupanya menjadi ladang bisnis yang sangat raksasa, mulai dari bisnis perminyakan hingga lingkungan hidup.

Misalnya, The Washington Group International yang bergerak di bidang jasa "perlindungan ladang minyak" hanya dalam tiga tahun (2003-2006) meraih uang 931 juta US Dollar. Perusahaan ini juga membangun dan memperbaiki gedung sekolah, pangkalan militer, dan sistem pengairan. Perusahaan Environmental Chemical yang memberikan jasa perlucutan senjata kimia dan efek kimiawi senjata meraup 878 juta US Dollar pada tahun 2006. Lalu,

1 Veseth, Michael. "What is International Political Economy?". Melalui <<http://www2.ups.edu/ipe/whatis.pdf>> [15.6/2017]

perusahaan International American Product yang mampu menyediakan listrik di kawasan perang, telah meraup 759 juta US Dollar selama 3 tahun pertama Perang Irak. Dan masih banyak sektor lainnya yang menguntungkan dari kawasan perang, terutama tentu saja penjualan senjata. Belum lagi bila kita menghitung keuntungan dari bisnis minyak yang diraih perusahaan-perusahaan minyak besar dunia (Big Oil).²

Sekilas data ini menunjukkan bahwa ada perputaran uang yang amat-sangat besar di balik perang. Bila kajian ini diperdalam, kita akan menemukan bahwa perang pun sangat identik dengan ekonomi, bukan hanya agama. Bahkan, jika kita menggunakan pendekatan resolusi konflik, kita akan menemukan bahwa akar dari beragam konflik kontemporer di Timur Tengah bukanlah agama, melainkan masalah ekonomi.

EPI membahas isu-isu berikut ini, perdagangan internasional, keuangan internasional, relasi Utara-Selatan, MNCs, hegemoni, dan globalisasi. Artikel-artikel dalam Jurnal ICMES edisi perdana ini secara umum sangat terkait dengan isu-isu tersebut.

Artikel pertama dari Firmanda Taufiq dan Lalu Wahyu Putra Utama yang berjudul *Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Arah Kebijakan Arab Saudi dalam Konflik Yaman Pasca Arab Spring 2011-2017* menunjukkan kepada kita dua hal penting yaitu bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi ternyata tidak lepas dari hegemoni AS dan sebaliknya, AS pun sangat berkepentingan untuk melakukan hegemoni terhadap negara-negara kaya minyak demi keamanan energinya.

Selanjutnya, dari artikel kedua yang ditulis Ajie Mahar Muhammad, dengan judul *Peran American Military Industrial Complex dalam Konflik Bersenjata di Timur Tengah*, kita dapat mengenali adanya kekuatan ekonomi global yang sangat berkepentingan dengan keberlanjutan perang. Keberadaan *Military Industrial Complex*, yang merupakan jejaring informal antara pemerintahan dari suatu negara dengan korporasi yang memproduksi senjata-senjata yang digunakan untuk berperang, merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan berlarut-larutnya konflik di Timur Tengah.

2 Businesspundit.com. 2008. "The 25 Most Vicious Iraq War Profiteers". Melalui <<http://www.businesspundit.com/the-25-most-vicious-iraq-war-profiteers/>> [15/6/2017]

Artikel ketiga yang ditulis Rostamaji Korniwani, berjudul *Dukungan Irlandia Terhadap Upaya Perdamaian di Palestina*, membahas upaya Irlandia memberikan dukungan kepada Palestina melalui jalur-jalur ekonomi, selain tentunya jalur diplomatik. Meskipun Irlandia tetap menjalin kerjasama ekonomi dengan Israel, negara ini merupakan negara Eropa yang paling keras mengkritik Israel. Aksi boikot yang dilakukan kelompok-kelompok sipil Irlandia menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Sebagaimana kita ketahui, rezim Apartheid di Afrika Selatan akhirnya tumbang setelah banyak negara di dunia melakukan aksi boikot ekonomi pada tahun 1980-an.

Sementara itu, artikel keempat yang berjudul *Kebijakan Luar Negeri Obama Dalam Konflik Timur Tengah* karya Laode Muhammad Fathun mengungkap lebih jauh kebijakan luar negeri Obama yang terlihat ambigu. Di satu sisi Obama selalu mengedepankan diplomasi khas Partai Demokrat yang menjunjung HAM, demokrasi, dan anti-perang. Namun di sisi lain, kebijakan luar negeri yang dihasilkannya sama seperti presiden-presiden pendahulunya, yaitu mendahulukan kepentingan ekonomi-politik AS di kawasan daripada menjaga perdamaian.

Dan terakhir, artikel yang ditulis oleh Alifian Maulana Nanda Pradana dan Dina Y. Sulaeman dengan judul *Peran Liga Arab Pada Konflik di Timur Tengah dalam Perspektif Politik dan Ekonomi*. Di dalamnya dibahas beberapa faktor penyebab kegagalan Liga Arab dalam menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah, yaitu eratnya kerjasama ekonomi dan saling ketergantungan antara negara-negara kaya Arab dengan AS, adanya relasi kuat antara AS dan Israel, serta kelemahan organisasional dalam tubuh Liga Arab sendiri.

Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES) adalah sebuah lembaga penelitian independen yang didedikasikan untuk mempelajari berbagai aspek mengenai Timur Tengah, mulai dari politik, ekonomi, militer, energi, budaya, hingga sejarah. Sebagaimana telah dikemukakan di awal tulisan ini, ICMES memiliki misi untuk menghadirkan kajian multidisipliner dengan harapan bahwa publik di Indonesia, khususnya para peminat Kajian Timur Tengah, dapat bersama-sama memperluas horizon cara pandang mengenai Timur Tengah. Cara pandang yang lebih luas terhadap Timur Tengah, akhir-akhir ini menjadi terasa sangat penting bagi publik di Indonesia, terutama karena

banyak friksi, bahkan konflik, di dalam negeri yang berakar dari cara pandang yang kurang tepat terhadap konflik di Timur Tengah.

Atas terbitnya Jurnal ICMES edisi perdana ini, kami mengucapkan terimakasih kepada partner ICMES, yaitu Pusat Studi Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Pusat Studi Timur Tengah IAIN Tulungagung, dan Prodi Politik Islam UIN Raden Patah Palembang, serta berbagai pihak yang telah membantu, mulai dari proses *review*, hingga penerbitan.

Semoga Jurnal ICMES memberikan sumbangsih keilmuan dan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan pemerhati Timur Tengah pada khususnya.

Bandung, 15 Juli 2017

Dr. Dina Y. Sulaeman, M.Si.

Diretur *Indonesia Center for Middle East Studies* (ICMES)

Studi Timur Tengah dan Orientasi Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Pendahuluan

Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia¹ Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah yang juga merupakan negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam². Namun kedekatan kultural ini ternyata tidak memiliki korelasi positif yang cukup berarti dengan orientasi politik luar negeri dari masing-masing negara, baik dari Indonesia maupun negara-negara Timur Tengah yang bersifat resiprokal, terutama dalam aspek ekonomi-politik. Data menunjukkan bahwa masing-masing pihak tidak saling mengutamakan satu dengan yang lainnya.

Saudi Arabia adalah negara yang dianggap representasi negara arab di kawasan Timur Tengah dan Iran adalah negara non-Arab yang dipandang sebagai salah satu determinan dalam dinamika kawasan ini. Data menunjukkan bahwa bagi Indonesia dan kedua negara tersebut, hubungan di antara mereka bukanlah prioritas yang utama dalam orientasi politik luar negerinya.

1 Pew Research Center. "10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050". Melalui <http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionstables74/> [4/6/2017]

2 Riza Sihbudi (2011) mencatat bahwa secara historis Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara-negara Timur Tengah khususnya Mesir, Suriah dan Irak karena menjadi negara-negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Republik Indonesia



Bagi Saudi Arabia, mitra utamanya dalam kerjasama ekonomi adalah AS, Tiongkok, dan Jepang. Kedua negara terakhir secara geografis berada di kawasan Asia Timur yang relatif sama dengan Indonesia. Namun, nilai investasi yang ditanamkan Saudi Arabia di kedua negara itu jauh lebih besar daripada di Indonesia. Investasi Arab Saudi di Tiongkok sebesar US\$ 65 miliar atau setara dengan Rp 867 triliun sementara investasi di Indonesia yang hanya sebesar US\$ 7 milyar atau setara dengan Rp 89 triliun. Jika dilihat dari nilai investasinya, maka di mata Saudi Arabia posisi Indonesia tidak lebih utama daripada Malaysia.³ Nilai investasi Saudi Arabia di Indonesia jauh lebih kecil daripada investasi Singapura di Indonesia yang pada tahun 2009 mencapai nilai US\$ 9,18 milyar atau sekitar Rp. 122 trilyun. Sebagai negara pengimpor minyak, ternyata impor minyak Saudi Arabia ke Indonesia sebesar 6,3 juta ton, lebih sedikit daripada Malaysia yang mencapai 7 juta ton dan Singapura yang mencapai 15,98 juta ton pada tahun 2015.⁴

Meskipun memiliki kesamaan kultural sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi orientasi utama politik luar negeri Saudi Arabia bukan Indonesia. Mitra perdagangan terbesar Saudi Arabia adalah Tiongkok dengan nilai perdagangan sebesar US\$ 51,83 miliar atau sekitar Rp 712 triliun pada 2015. Amerika Serikat merupakan mitra dagang Saudi terbesar kedua dengan nilai transaksi US\$ 43,1 miliar dan Korea Selatan di urutan ketiga dengan nilai transaksi mencapai US\$ 29 miliar. Sementara Indonesia berada di posisi ke 17, dengan nilai transaksi perdagangan hanya US\$ 5,5 miliar.⁵

Tidak jauh berbeda dengan Saudi Arabia, mitra utama perdagangan Iran adalah bukan Indonesia, melainkan Uni Emirat Arab (23,6%) dan Tiongkok (22,3%), sedangkan Uni Eropa berada di peringkat kelima (6%).⁶ Rendahnya nilai kemitraan perdagangan Indonesia dengan Iran terutama dipengaruhi

3 Theaustralian.com.au. 2017. "Indonesia's Joko Widodo Laments Saudi Investment". Melalui <<http://www.theaustralian.com.au/news/world/indonesias-joko-widodo-laments-saudi-investment-of-only-88bn/news-story/5b632f61b14255bebb873aef94f050bb>> [4/6/2017]

4 Data dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS)

5 Katadata.co.id. 2017. "Ternyata, Tiongkok Mitra Dagang Terbesar Arab Saudi". Melalui <<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/28/siapa-mitra-dagang-terbesar-arab-saudi>> [4/6/2017]

6 c.europa.eu. 2017. "Iran". Melalui <<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/iran/>> [4/6/2017]

oleh adanya sanksi yang dilakukan oleh beberapa negara Barat dan lembaga-lembaga internasional terhadap Iran.

Variabel kerjasama bilateral di bidang ekonomi menjadi indikator utama yang menunjukkan orientasi politik di antara dua negara. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa bagi negara-negara Timur Tengah yang diwakili oleh Saudi Arabia dan Iran, Indonesia bukanlah mitra strategis yang dianggap sangat penting. Jika merujuk data kondisi sebaliknya pun berlaku, karena orientasi politik luar negeri Indonesia terutama difokuskan kepada ASEAN, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

Arti Penting Timur Tengah Bagi Indonesia

Sebetulnya tidak perlu ada dilema atau dikotomi dalam hal orientasi politik luar negeri Indonesia. Sebagai negara yang secara geografis berada di kawasan Asia Tenggara sangat logis jika Indonesia menjadikan ASEAN sebagai salah satu fokus utamanya, demikian pula dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, kedua negara tersebut saat ini adalah aktor terpenting yang mendisain arah politik dan ekonomi global. Tetapi mengabaikan kawasan Timur Tengah juga bukan pilihan yang tepat. Selain secara kultural memiliki keterkaitan yang erat, kawasan Timur Tengah merupakan episentrum ekonomi-politik global. Tidak heran jika negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok mengerahkan perhatian utamanya di sana.

Arti penting kawasan Timur Tengah bagi dunia adalah selain karena kawasan ini menjadi sumber energi fosil bagi banyak negara, juga karena kawasan ini menjadi penentu arah pendulum kondisi keamanan global. Beberapa perang besar yang terjadi baik sejak masa Perang Dunia I dan II, kemudian masa Perang Dingin maupun pasca Perang Dingin terjadi di kawasan ini. Terlebih lagi kini perang asimetrik yang melibatkan aktor-aktor nonnegara seperti kelompok-kelompok teroris transnasional berasal dari kawasan ini.

Saudi Arabia dan Iran merupakan dua aktor utama yang menentukan ke arah mana pendulum yang menggambarkan kondisi keamanan global akan bergerak. Persaingan kedua negara menjadi determinan temperatur politik keamanan di kawasan Timur Tengah. Sebagai negara dengan jumlah

penduduk beragama Islam terbanyak di dunia dan dengan citra sebagai negara Muslim moderat (setidaknya hingga beberapa tahun terakhir ini), Indonesia dapat menjadi penengah di antara kedua negara, atau memberi warna, menggeser arah pendulum ke arah yang lebih baik.

Bagi negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, kawasan Timur Tengah mungkin hanya dianggap sebagai sumber daya atau komoditas yang harus dieksploitasi demi kepentingan nasional mereka belaka. Berbeda dengan mereka, Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa dalam konteks sistem global, apa yang terjadi di kawasan tersebut dipengaruhi dan memberi pengaruh terhadap sistem global termasuk Indonesia. Sehingga menjadi penting bagi Indonesia untuk menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai fokus utama politik luar negerinya.

Di sinilah letak relevansi dari arti studi Timur Tengah bagi para sarjana di Indonesia. Para pengkaji studi Timur Tengah Indonesia harus berperan aktif memberikan sumbangan pemikiran memberikan perspektif tentang bagaimana kawasan ini harus dikelola tentang bagaimana sikap pemerintah dan masyarakat Indonesia seharusnya terhadap permasalahan yang ada di kawasan tersebut.

Pendekatan transdisiplin yang mengedepankan prinsip-prinsip ilmiah dan logika yang baik perlu menjadi dasar dalam mengembangkan studi Timur Tengah dewasa ini. Para penstudi Timur Tengah yang jujur, adil, dan mengedepankan prinsip-prinsip ilmiah harus berada di garis depan, mengingat saat ini terlalu banyak beredar opini tentang apa yang terjadi di Timur Tengah yang tidak didukung oleh prinsip-prinsip ilmiah.

Oleh karena itu, kami dari Pusat Studi Timur Tengah Universitas Padjadjaran menyambut baik penerbitan Jurnal ICMES, *The Journal of Middle East Studies*. Semoga jurnal ini dapat berkembang dengan baik dan konsisten memberikan pencerahan kepada publik mengenai dinamika Timur Tengah dengan cara-cara yang *credible* dan ilmiah.

Bandung, 5 Juni 2017

Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.IP., S.Si., M.T., M.Si. (Han)

(Direktur Pusat Studi Timur Tengah Universitas Padjadjaran)

Daftar Pustaka

Baldwin, David A. 1997. *The Concept of Security*, British International Study Association.

Baylis, John. 2013. *Internasional and Global Security in Post-Cold War Era*, New York, Oxford University Press USA.

Cordesman, Anthony H, and Arleigh A Burke. 2001. *Saudi Arabia and Iran*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.

Cordesman, Anthony H. 2003. *Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century*. Westport, CT: Praeger.

Crocker, Chester A. Fen Osler, Hampson, dan Pamela. 2001. *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict*. Washington D.C.: United States Institute of Peace Press.

Keynoush, Banafsheh. 2016. *Saudi Arabia and Iran Friends or Foes?* New York: Palgrave Macmillan.

Selvik and S. Stenslie. 2011. *Stability and Change in the Modern Middle East*. London and New York: I. B. Tauris & Co Ltd.

Peran Media dalam Pembentukan Opini Publik Mengenai Isu Timur Tengah

Perbincangan mengenai kawasan Timur Tengah beserta dinamika sosio-politik yang terus berkembang hingga detik ini memang selalu menarik perhatian dunia. Menarik perhatian dunia? Ya, ada berbagai alasan mengapa dunia begitu *concern* terhadap kawasan ini. Beberapa alasan mungkin bisa dirangkum dalam poin-poin utama di tulisan ini.

Tidak dapat dipungkiri, dewasa ini media massa, baik cetak maupun elektronik lebih dominan menghembuskan alasan ideologis dan sektarian dalam suasana ketegangan kawasan di Timur Tengah, daripada masalah-masalah lain yang sejatinya biasa juga terjadi di wilayah *nation state* (negara-negara berdaulat) lainnya di dunia. Timur Tengah menjadi kawasan yang begitu 'seksi' untuk selalu dilirik, jika ditinjau dari aspek geopolitik, ekonomi, dan tentu saja aspek historis-kulturnya. Konflik dan disintegrasi berkepanjangan di wilayah tersebut selalu dikaitkan dengan tendensi agama atau keyakinan tertentu.

Sejak imperium Turki Utsmani yang tercatat oleh sejarawan sebagai representasi kekuasaan Islam terakhir runtuh di tahun 1924, dengan khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II, polemik sosio-politik di Timur Tengah seakan tidak berhenti mereda. Sampai hari ini, ketika babak-babak baru *Arab Spring* yang 'berlabuh' di Suriah masih terus berlanjut. Konflik horizontal di era kepemimpinan Bashar al-Assad ternyata tidak mudah berakhir seperti



konflik yang melanda rezim Zine al-Abidine Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, Moammar Qaddafi yang terbunuh di tangan rakyat Libya, dan berakhirnya kekuasaan Ali Abdullah Saleh di Yaman. Tampaknya tanda-tanda bahwa tragedi berdarah di Suriah, bumi lahirnya peradaban-peradaban dunia ini, belum mau berakhir. Jalan panjang menuju metamorfosis sejarah politik dan peradaban di Timur Tengah masih berlanjut seiring dengan gencarnya perang wacana dan media di dunia maya. Terbentuknya Masyarakat Digital (*Digital Society*) juga memberikan peran besar dalam menghembuskan ke arah mana gejolak dan angin revolusi itu akan bertepi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, di abad ini, media menjadi pelaku sekaligus saksi sejarah perubahan rezim berkuasa di Timur Tengah.

Masyarakat dunia, melalui media-media cetak maupun elektronik, lebih sering menerima sajian 'hidangan' informasi berupa perang berdarah dan krisis kemanusiaan yang seakan tak berujung. Alasan klasik yang dikemukakan biasanya adalah bahwa konflik di sana dilandasi oleh berebutan kekuasaan berbasis agama dan sektarian. Perang wacana tersebut sangat laris manis dikonsumsi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Apalagi jika kadang dikorelasikan dengan fakta bahwa wilayah di Timur Tengah adalah tanah kelahiran tiga agama samawi terbesar di dunia, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Namun sebenarnya, perebutan pengaruh dan kepentingan di kawasan tidak sesederhana itu. Timur Tengah dengan sumber daya alam yang dimilikinya juga menjadi daya tarik tersendiri negara-negara kelas satu dunia. Tidak hanya terbatas di situ, konflik Israel-Palestina yang belum menemukan resolusi politik menuju transisi yang dapat diterima kedua belah pihak yang berkonflik juga selalu menyita perhatian masyarakat dunia. Ditambah lagi dengan ketegangan sosial-politik yang belum dapat diredam di beberapa negara yang terkena hembusan *Arab Spring*. Dengan alasan-alasan ini, tampak wajar jika segala hal yang berkaitan dengan Timur Tengah selalu menarik perhatian bersama.

Keberpihakan negara-negara adikuasa dan intervensi kekuatan asing kepada negara berkonflik juga memberikan pengaruh yang tidak sedikit -jika tidak mau dikatakan sangat signifikan- dalam memperkeruh suasana konflik

yang ada. Bagi pengamat dan analis politik Timur Tengah dan internasional, sejatinya tidak sulit untuk menentukan di barisan mana negara-negara seperti Amerika, Uni Eropa, Rusia, China, dan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, dan Iran itu berpihak. Alasannya tidak jauh dari kepentingan regional yang dimiliki masing-masing negara. Meminjam “kacamata” pegiat dan pemerhati Timur Tengah, Dina Sulaeman menyimpulkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi konflik, yaitu *triggers* (pemicu), *pivotal* (akar), *mobilizing* (peran pemimpin), dan *aggravating* (faktor yang memperburuk atau memperuncing situasi konflik). Sebuah analisis yang sedikit berbeda dalam membaca Timur Tengah, karena biasanya media lebih mengupas krisis multidimensi kawasan Timur Tengah hanya dengan menyoal benturan dua kepentingan besar yaitu suara (keinginan) rakyat dan penguasa (rezim). Mengkaji konflik secara komprehensif dibutuhkan untuk melihat persoalan politik kawasan yang sangat kompleks. Bukan hanya berhenti di isu konflik sektarian sebagai alasan utama terjadinya revolusi negara-negara di Timur Tengah.

Ketegangan sosial-politik di Timur Tengah hingga hari ini masih menysakan konflik di Suriah, mungkinkah akan berakhir? Tentu saja, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Karena memang tidak mudah membedah berbagai permasalahan dan polemik yang terus berkembang mewarnai kawasan Timur Tengah. Apalagi melihat *chaos* dan memahaminya dengan keluar dari sekat-sekat *sosio-culture* yang begitu kental dengan nuansa sektarian dan aroma ideologis. Tapi, kalimat “tidak mudah”, bukan berarti tidak bisa. Pemahaman yang obyektif dan jernih perlu dihadirkan di tengah-tengah minimnya pemberitaan media yang belum berimbang. Dengan hadirnya Jurnal ICMES ini, semoga dapat memberikan *worldview* yang utuh, obyektif, original, sekaligus memperkaya dengan beberapa pandangan, tulisan, kajian, dan bahkan pembacaan media mainstream nasional, maupun dunia mengenai dinamika ketimurtengahan yang selama ini telah hadir.

Akhirnya, kami dari PSTT (Pusat Studi Timur Tengah) IAIN Tulungagung tentu saja sangat mengapresiasi atas lahirnya jurnal perdana ICMES. Semoga PSTT IAIN Tulungagung yang telah menjalin MoU dengan ICMES di masa mendatang dapat bekerjasama lebih intens dalam penerbitan jurnal berikutnya dan aktivitas-aktivitas keilmuan lainnya, khususnya di bidang

Studi Timur Tengah. Harapan kami, semoga dengan penerbitan Jurnal ICMES ini, dapat menambah kajian dan khazanah wawasan yang mencerahkan sekaligus menghadirkan pandangan dan harapan menuju terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sehingga *Arab Spring* yang nyala apinya masih berkobar-kobar panas dapat berubah makna menjadi *Musim Semi* yang (sejatinya) membawa angin kesejukan dan kedamaian bagi setiap makhluk yang berpijak di atas bumi Bulan Sabit Subur dan sekitarnya.

Salam hangat PSTT untuk ICMES. Semoga sukses selalu.

Tulungagung, 29 Mei 2017

M. Khoirul Malik, Lc., M.A.

Direktur Pusat Studi Timur Tengah (PSTT) IAIN Tulungagung

Timur Tengah dalam Hegemoni Amerika Serikat

Secara sosial dan kultural, Timur Tengah memiliki karakteristik yang khas, sekaligus menarik. Di kawasan inilah tiga agama besar dunia lahir, Yahudi, Kristen, dan Islam. Secara kultural Timur Tengah didominasi bangsa Arab dan umat Muslim, meskipun ada banyak suku dan agama lain yang juga berbagai tempat di kawasan ini. Faktor geopolitik dan multietnik menjadi faktor yang membuat kawasan ini rawan konflik dan teror.¹

Meski kawasan Timur Tengah sangat dan memiliki segala kekayaan alam yang melimpah, kawasan ini dikenal sebagai “wilayah panas” dengan berbagai konflik kepentingan.² Konflik Israel dan Palestina, konflik Suriah yang melibatkan Turki, Iran, dan Arab Saudi, isu sektarian Sunni-Syiah, serta munculnya *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau *Daesh* menjadi isu yang paling banyak menyita perhatian dunia. Di tengah berbagai isu dan konflik ini, Amerika Serikat (AS) dengan lihai memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi-politiknya. Misalnya, perselisihan di antara negara-negara Arab membuat penjualan senjata dari AS semakin meningkat dari tahun ke tahun.

AS yang tampil sebagai negara adidaya tunggal seiring dengan berakhirnya Perang Dingin sering sekali memberlakukan politik standar ganda di Timur Tengah. Di satu sisi, AS sejak tahun 2001 AS menginvasi Afghanistan

1 Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, (Bandung; Mizan; 2007) h. xxi-xxii

2 Sri Hayati & Ahmad Yani, *Geografi Politik*, (Bandung; RefikaAditama; 2007) h.65



dengan alasan memerangi Al Qaida. Lalu perang berlanjut ke negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Irak, Libya, Suriah, dan Yaman, dengan modus yang berbeda-beda. Di saat yang sama, AS tetap berbaik-baik dengan negara-negara agresor, seperti Arab Saudi yang sejak 2015 membombardir Yaman, atau Israel yang tak pernah henti melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Tak ayal, kebijakan AS tersebut menjadi salah satu penyebab utama instabilitas di Timur Tengah.

Pasca terpilihnya Trump menjadi Presiden AS, kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah masih menjadi tanda tanya, namun bisa diprediksi tidak akan mengalami perubahan. Secara umum, pemerintah AS saat ini dihadapkan pada tiga isu utama. Pertama, perang sipil berkepanjangan di Suriah yang melibatkan pemerintah Bashar al-Assad yang didukung oleh Rusia dan Iran di satu pihak, dan kelompok-kelompok perlawanan yang beragam, dari yang paling ekstrim seperti ISIS hingga ke perlawanan etnis Kurdi. Kedua, konflik Israel-Palestina yang tak kunjung menemui jalan keluar. Trump sebagaimana presiden-presiden AS sebelumnya kembali menjanjikan bahwa persahabatan antara AS dan Israel akan terus abadi. Ketiga, perjanjian nuklir Iran dengan AS Inggris, Perancis, Jerman, Russia dan China (perjanjian Jenewa). Terpilihnya kembali Hassan Rouhani dalam pilres Iran Juni 2017 membuat ketegangan AS-Iran terlihat melunak. Rouhani dianggap Barat sebagai penerus Khatami yang reformis, dan antitesis Ahmadinejad yang dianggap keras dan konservatif.

Namun, beredar kabar bahwa Trump merencanakan akan membubarkan perjanjian ini. Inti dari kesepakatan ini adalah kesediaan Iran mengurangi aktivitas pengayaan uranium di bawah 20% dengan konsesi dicabutnya embargo dari negara-negara barat. Artinya Iran berpeluang mencairkan dana-dana mereka dari perbankan dan aktivitas ekspor mereka bisa kembali dijalankan. Jika Trump secara sepihak membatalkan perjanjian nuklir ini, gejolak di kawasan tak akan terhindarkan. Di satu sisi, Amerika ingin menerapkan sanksi yang lebih ketat sedangkan Iran merasa mempunyai lisensi untuk melakukan aktivitas nuklirnya karena Amerika Serikat melanggar atau mencabut perjanjian secara sepihak.

Dari tiga isu utama di atas, persoalan konflik dan perang sipil di Suriah tampaknya akan menjadi perhatian dan prioritas utama

Amerika Serikat. Pada April 2017, Trump memerintahkan militer AS membombardir instalasi militer Suriah yang diyakini menjadi pusat kekuatan militer rezim Bashar Assad dengan rudal Tomahawk. Lalu, AS juga meningkatkan serangan-serangannya di Suriah dan Irak dengan alasan melawan ISIS.

Pada awal pemerintahannya, Trump tampaknya menolak intervensi dan keterlibatan AS dalam konflik Suriah dan Timur tengah, namun seiring dengan berjalannya waktu, tekanan dan proposal dari berbagai pihak yang berkepentingan di kawasan ini, nampaknya telah menggoyahkan janji-janji Trump di masa kampanye mengenai pengurangan perang di luar negeri, terutama di Timur Tengah.

Perkembangan terakhir yang cukup mengejutkan adalah ketika Trump hadir di *Arab Islamic American summit* pada Mei 2017 dan menyatakan bahwa negara yang mendukung terorisme di kawasan adalah Iran. Tak lama kemudian, AS bersama-sama Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan sejumlah negara lain menuduh Qatar sebagai pihak yang mendanai terorisme, terutama ISIS dan afiliasi Al Qaida (Jabhat al Nusra). Negara-negara Arab bahkan telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar.

Semua ini menunjukkan bahwa dinamika Timur Tengah sangat dihegemoni oleh AS. Karena itu, kajian Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari peran AS sebagai aktor kuat di kawasan ini.

Karena itu, kami dari Prodi Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah menjalin MoU dengan Indonesia Center for Middle East Studies menyambut baik penerbitan Jurnal ICMES. Semoga dengan kehadiran jurnal ini, kajian mengenai Timur Tengah dapat semakin diperdalam di berbagai aspek, mulai dari geopolitik, politik-ekonomi, budaya, agama, dan berbagai hal lainnya.

Palembang, 1 Juni 2017

Kiki Mikail, MA

Dosen Prodi Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

